

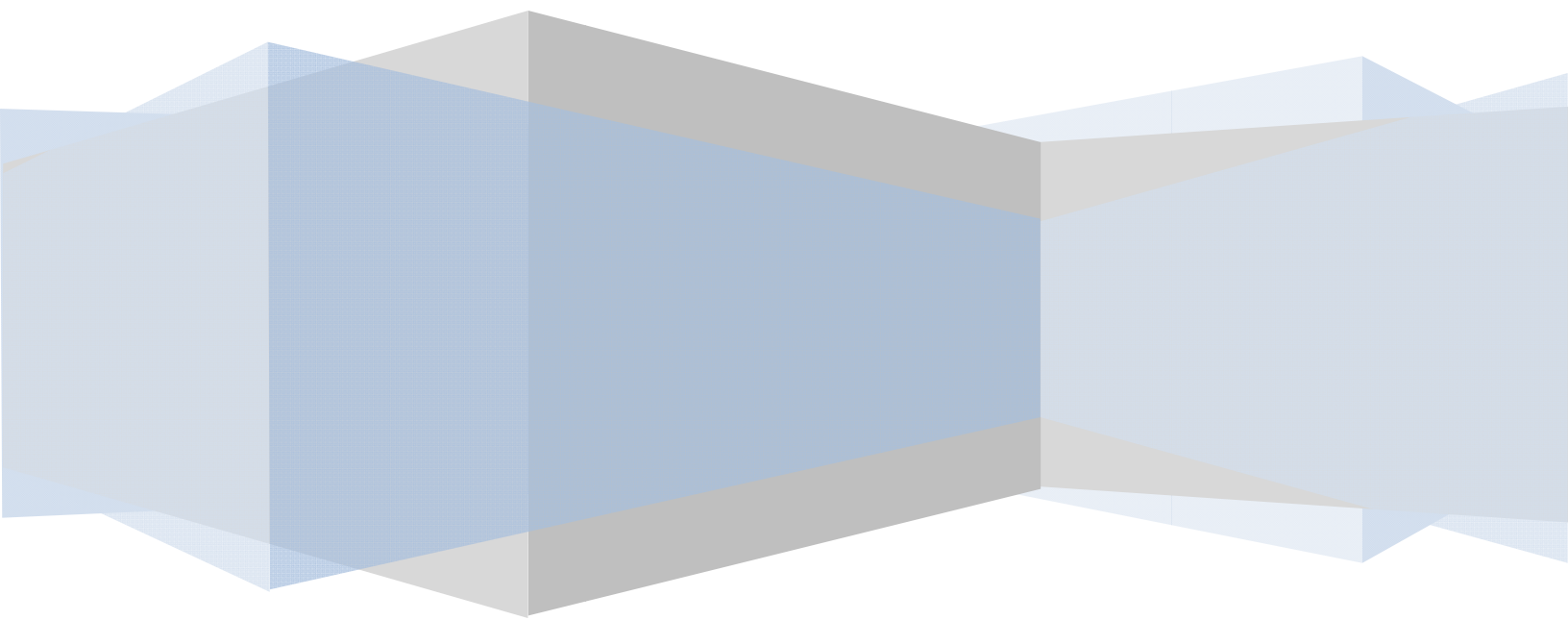


Pengadilan Tinggi Agama Padang

Reviu Indikator Kinerja Utama



Jln. By Pass Km 24 Anak Air Padang – Sumatera Barat





KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**

NOMOR : W3-A/279/OT.01.2/I/2017

**TENTANG
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, Maka Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 10 Januari 2017 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2015-2019.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2015-2019.

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Padang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di bawah PTA. Padang dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 16 Januari 2017

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang



Maslihan Saifurrozi
Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H
NIP. 19521015 198511 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase produktifitas memutus perkara	Perbandingan antara jumlah perkara dengan perkara yang diputus.	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<i>Clereance rate</i>	Perbandingan antara jumlah perkara dengan perkara yang telah diminutasi	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara dengan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase sisa perkara	Perbandingan jumlah perkara dengan perkara yang belum selesai diputus pada akhir tahun.	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Persentase perkara yang diselesaikan dengan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase penyelesaian perkara Ekonomi syariah	Perbandingan jumlah perkara Ekonomi Syariah yang masuk dengan perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pemakaian Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding	Perbandingan jumlah perkara dengan perkara yang diselesaikan dengan memakai aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo yang masuk dari Pengadilan Tk. I	Perbandingan perkara prodeo yang masuk dari Pengadilan tingkat pertama dengan perkara prodeo yang diselesaikan	Majelis Hakim Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Integrasi informasi perkara secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding	Perbandingan jumlah perkara dengan perkara yang telah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tingkat banding.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	Monitoring dan evaluasi standarisasi pemakaian IT dalam penyelesaian perkara	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

@Tim Penyusun LKjIP 2016 PTA. Padang

